



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ) TAHUN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

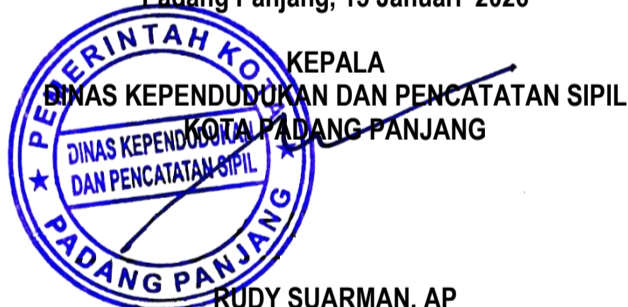
Penyusunan LKPJ ini merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam upaya mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaiannya disajikan dalam laporan ini sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja perangkat daerah pada tahun berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Padang Panjang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang atas arahan dan dukungan yang diberikan, serta kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait atas sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akhir kata, kami berharap LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 15 Januari 2026



**RUDY SUARMAN, AP**  
Pembina Utama Muda, NIP. 19740918 199311 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN.....	1
BAB I PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	7
BAB III PROGRAM UNGGULAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.....	15
BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	16
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....	17
BAB V I PENUTUP .....	18
Lampiran.....	19

## PENDAHULUAN

Dalam tatanan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan azas otonomi daerah. DPRD dengan Kepala Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah menjalin kerjasama hubungan fungsional, dimana hal ini merupakan landasan terbentuknya hubungan pengawasan dan kemitraan yang seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD tersebut. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Salah satu kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah di bidang akuntabilitas setelah tahun anggaran berakhir adalah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Secara garis besar, LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD, sebagai upaya penciptaan sistem pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sumber utama bahan penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, dengan substansinya adalah laporan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

### Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.
- e. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

### Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi Kota Padang Panjang mencerminkan visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota Padang Panjang yang termaktub dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu: **Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah**".

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki keterkaitan dengan Misi ke 3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Akuntabel, Profesional, Transparan dan Inovatif.

Data Umum Dinas Dukcapil

a. Jumlah Penduduk;

**JUMLAH PENDUDUK  
DI KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN			KETERANGAN
		L	P	L+P	
1	<b>KOTA PADANG PANJANG</b>	<b>32,319</b>	<b>31,840</b>	<b>64,159</b>	
	<b>PADANG PANJANG TIMUR</b>	<b>13,997</b>	<b>13,807</b>	<b>27,804</b>	
1	GANTING	1,798	1,740	3,538	
2	SIGANDO	1,111	1,054	2,165	
3	EKOR LUBUK	1,420	1,361	2,781	
4	NGALAU	1,753	1,795	3,548	
5	GUGUK MALINTANG	3,627	3,692	7,319	
6	KOTO PANJANG	2,567	2,467	5,034	
7	KOTO KATIK	707	662	1,369	
8	TANAH PAK LAMBIK	1,014	1,036	2,050	
	<b>PADANG PANJANG BARAT</b>	<b>18,322</b>	<b>18,033</b>	<b>36,355</b>	
1	BUKIT SURUNGAN	1,383	1,428	2,811	
2	PASAR USANG	2,001	1,989	3,990	
3	KAMPUNG MANGGIS	4,184	4,023	8,207	
4	SILAING BAWAH	3,347	3,279	6,626	
5	SILAING ATAS	1,259	1,242	2,501	
6	PASAR BARU	890	855	1,745	
7	TANAH HITAM	1,926	1,984	3,910	
8	BALAI-BALAI	3,332	3,233	6,565	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Th 2025 - diolah

b. Pertumbuhan Penduduk;

**PERTUMBUHAN PENDUDUK  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN			KETERANGAN
		L	P	L+P	
1	<b>KOTA PADANG PANJANG</b>	<b>32,319</b>	<b>31,840</b>	<b>64,159</b>	<b>0.41</b>
	<b>PADANG PANJANG TIMUR</b>	<b>13,997</b>	<b>13,807</b>	<b>27,804</b>	<b>0.44</b>
1	GANTING	1,798	1,740	3,538	<b>0.45</b>
2	SIGANDO	1,111	1,054	2,165	1.03
3	EKOR LUBUK	1,420	1,361	2,781	0.11
4	NGALAU	1,753	1,795	3,548	<b>1.11</b>
5	GUGUK MALINTANG	3,627	3,692	7,319	(0.15)
6	KOTO PANJANG	2,567	2,467	5,034	0.88
7	KOTO KATIK	707	662	1,369	<b>(0.51)</b>

8	TANAH PAK LAMBIK	1,014	1,036	2,050	0.79
<b>11</b>	<b>PADANG PANJANG BARAT</b>	<b>18,322</b>	<b>18,033</b>	<b>36,355</b>	<b>0.39</b>
1	BUKIT SURUNGAN	1,383	1,428	2,811	<b>1.33</b>
2	PASAR USANG	2,001	1,989	3,990	(0.37)
3	KAMPUNG MANGGIS	4,184	4,023	8,207	1.38
4	SILAING BAWAH	3,347	3,279	6,626	<b>0.20</b>
5	SILAING ATAS	1,259	1,242	2,501	(0.91)
6	PASAR BARU	890	855	1,745	0.35
7	TANAH HITAM	1,926	1,984	3,910	<b>0.36</b>
8	BALAI-BALAI	3,332	3,233	6,565	(0.03)

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Th 2025 - diolah

c. Jumlah ASN

No.	Status Kepegawaian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pegawai Negeri Sipil	6 Orang	7 Orang	13 Orang
2.	PPPK	0	3 Orang	3 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>6 orang</b>	<b>10 orang</b>	<b>16 orang</b>

## BAB I

### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semula sebesar Rp3.941.070.161. Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 terjadi efisiensi/pengurangan anggaran sebesar Rp718.471.019 sehingga menjadi Rp3.222.599.14 sebagaimana ditetapkan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun rinciannya terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah .....	Rp.	Nihil
2. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.	Nihil
3. <b>Jumlah Pendapatan Daerah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>NIHIL</b>
4. Belanja Daerah:		
Belanja Operasi.....	Rp.	3.171.469.342
Belanja Modal.....	Rp.	51.129.800
<b>Jumlah Belanja Daerah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.222.599.142</b>

a. Format Realisasi Program / Kegiatan (Kondisi TMT 31 Desember 2025)

No.	OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
I.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	APBD	2.820.682.482	2.557.007.284	90,65
1.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD	2.290.358.353	2.206.675.405	96,35
1)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	2.290.358.353	2.206.675.155	96,35
2.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD	112.395.705	78.076.752	69,47
1)		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD	2.114.200	1.634.000	77,29
2)		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	15.991.305	12.310.500	76,98
3)		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	4.167.700	3.378.100	81,05

No.	OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
4)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	90.122.500	60.754.152	67,41
<b>3.</b>		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>APBD</b>	<b>5.564.900</b>	<b>3.607.500</b>	<b>64,83</b>
1)		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	5.564.900	3.607.500	64,83
<b>4.</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>APBD</b>	<b>223.521.524</b>	<b>152.451.677</b>	<b>68,20</b>
1)		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	41.461.524	25.222.587	60,83
2)		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	182.060.000	127.229.090	69,88
<b>5.</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>APBD</b>	<b>188.842.000</b>	<b>116.196.200</b>	<b>61,53</b>
1)		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	146.540.000	78.498.800	53,57
2)		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	9.360.000	5.000.000	53,42
3)		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	APBD	32.942.000	32.697.400	99,26
<b>II.</b>		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>APBD</b>	<b>195.078.840</b>	<b>182.790.502</b>	<b>93,70</b>
<b>1.</b>		<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>APBD</b>	<b>15.773.720</b>	<b>13.064.600</b>	<b>82,83</b>
1)		Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	APBD	761.720	705.500	92,62
2)		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	APBD	15.012.000	12.359.100	82,33
<b>2.</b>		<b>Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>APBD</b>	<b>147.754.920</b>	<b>140.899.302</b>	<b>95,36</b>
1)		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	APBD	5.564.900	3.607.500	64,83
2)		Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	APBD	142.190.020	137.291.802	96,56



No.	OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>APBD</b>	<b>31.550.200</b>	<b>28.826.600</b>	<b>91,37</b>
1)		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	APBD	31.550.200	28.826.600	91,37
III.		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>APBD</b>	<b>98.276.970</b>	<b>79.554.154</b>	<b>80,95</b>
1.		<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>APBD</b>	<b>98.276.970</b>	<b>79.554.154</b>	<b>80,95</b>
1)		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	APBD	98.276.970	79.554.154	80,95
IV.		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>APBD</b>	<b>98.579.850</b>	<b>73.371.766</b>	<b>74,43</b>
1.		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>APBD</b>	<b>98.579.850</b>	<b>73.371.766</b>	<b>74,43</b>
1)		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD	20.717.000	8.700.100	41,99
2)		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD	9.336.000	3.536.000	37,87
3)		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	APBD	68.526.850	61,135.666	89,21
V.		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>APBD</b>	<b>9.981.000</b>	<b>7.665.000</b>	<b>76,80</b>
1.		<b>Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>APBD</b>	<b>9.981.000</b>	<b>7.665.000</b>	<b>76,80</b>
1)		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	APBD	9.981.000	7.665.000	76,80
<b>TOTAL</b>				<b>3.222.599.142</b>	<b>2.900.388.706</b>	<b>90,00</b>

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN DAERAH**

**1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan Adinistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran di tahun 2025 sebesar Rp3.222.599.142 dan realisasi sebesar Rp2.900.388.705 atau 90,00 %. Dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Realisasi Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase %
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3,222,599,142	2,900,388,706	90.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,290,358,353	2,206,675,155	96.35
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	112,395,705	78,076,752	69.47
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,564,900	3,607,500	64.83
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223,521,524	152,451,677	68.20
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,842,000	116,196,200	61.53
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15,773,720	13,064,600	82.83
		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	147,754,920	140,899,302	95.36
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	31,550,200	28,826,600	91.37
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	98,276,970	79,554,154	80.95

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase %
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98,579,850	73,371,766	74.43
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	9,981,000	7,665,000	76.80

**Tabel 1.b**  
**Capaian Kinerja Realisasi Program / Kegiatan**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana		Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
							Fisik	%		
							Rp.			
1	2	3		4		6	7	8	9	10
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	100%	100%	100.00		
					Jumlah Dana	2,820,682,482	2,557,007,284	90.65		
			a.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00		
					Jumlah Dana	2,290,358,353	2,206,675,155	96.35		
			-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/Bulan	294 Orang/Bulan	100.00		
					Jumlah Dana	2,290,358,353	2,206,675,155	96.35		
			b.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100.00		
					Jumlah Dana	112,395,705	78,076,752	69.47		
			-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00		
					Jumlah Dana	2,114,200.00	1,634,000	77.29		
			-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100.00		
					Jumlah Dana	15,991,305	12,310,500	76.98		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana		Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
							Fisik	%		
							Rp.			
1	2	3		4		6	7	8	9	10
			-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00		
					Jumlah Dana	4,167,700	3,378,100	81.05		
			-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	100.00	Terjadinya bencana alam yang menyebabkan putusnya jalan provinsi, sehingga tidak bisa melakukan perjalanan dinas ke luar daerah	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan terukur
					Jumlah Dana	90,122,500	60,754,152	67.41		
			<b>c.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					<b>Jumlah Dana</b>	<b>5,564,900</b>	<b>3,607,500</b>	<b>64.83</b>		
			-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.00	Rendahnya realisasi keuangan karena tingginya satuan harga pada SIPD yang menjadi DPA	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan terukur
					Jumlah Dana	5,564,900	3,607,500	64.83		
			<b>d.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					<b>Jumlah Dana</b>	<b>223,521,524</b>	<b>152,451,677</b>	<b>68.20</b>		
			-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100.00	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini karena memaksimalkan efisiensi pemakaian listrik dan air	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan terukur
					Jumlah Dana	41,461,524	25,222,587	60.83		
			-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	100.00	Anggaran yang disediakan untuk sopir tidak terpakai karena tidak	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana		Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
							Fisik	%		
							Rp.			
1	2	3		4		6	7	8	9	10
					Jumlah Dana	182,060,000	127,229,090	69.88	adanya pengganti sopir yang mengundurkan diri	terukur
			e.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					<b>Jumlah Dana</b>	<b>188,842,000</b>	<b>116,196,200</b>	<b>61.53</b>		
			-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	100.00	menghabiskan stok opname BBM tahun sebelumnya dan anggaran yang ditambahkan di perubahan untuk BBM juga pemeliharaan 1 unit kendaraan roda 4 tidak terpakai.	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan terukur
					Jumlah Dana	146,540,000	78,498,800	53.57		
			-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	14 Unit	82.35	Anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan server dan AC tidak terpakai karena mengalami kerusakan	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan terukur
					Jumlah Dana	9,360,000	5,000,000	53.42		
			-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.00		
					Jumlah Dana	32,942,000	32,697,400	<b>99.26</b>		
			2	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital</b>	<b>34%</b>	<b>36.06%</b>	<b>106.06</b>		
					<b>Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak</b>	<b>97%</b>	<b>99.17%</b>	<b>102.24</b>		
					<b>Jumlah Dana</b>	<b>195,078,840</b>	<b>182,790,502</b>	<b>93.70</b>		
			a.	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penduduk yang Terlayani terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana		Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
							Fisik	%		
							Rp.			
1	2	3		4		6	7	8	9	10
					<b>Perekaman KTP Elektronik</b>	<b>99.2%</b>	<b>99.29%</b>	<b>100.09</b>		
					<b>Jumlah Dana</b>	<b>15,773,720</b>	<b>13,064,600</b>	<b>82.83</b>		
			-	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4.500 Dokumen	5.107 Dokumen	113,45		
					Jumlah Dana	761,720	705,500	92.62		
			-	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	13 Laporan	100.00		
					Jumlah Dana	15,012,000	12,359,100	82.33		
			<b>b.</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pendaftaran Penduduk yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					<b>Jumlah Dana</b>	<b>147,754,920</b>	<b>140,899,302</b>	<b>95.36</b>		
			-	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	Rendahnya realisasi keuangan karena tingginya satuan harga pada SIPD yang menjadi DPA	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan terukur
					Jumlah Dana	5,564,900.00	3,607,500	64.83		
			-	Pengadaan Dokumen Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6.000 Dokumen	6.000 Dokumen	100.00		
					Jumlah Dana	142,190,020	137,291,802	96.56		
			<b>c.</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>100</b>		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana		Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
							Fisik	%		
							Rp.			
1	2	3		4		6	7	8	9	10
					Jumlah Dana	31,550,200	28,826,600	91.37		
			-	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	100.00		
					Jumlah Dana	31,550,200	28,826,600	91.37		
			3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					<b>Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					<b>Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					<b>Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					Jumlah Dana	98,276,970	79,554,154	80.95		
			a.	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun</b>	<b>1300 Akta</b>	<b>1014 Akta</b>	<b>78.00</b>		
					Jumlah Dana	98,276,970	79,554,154	80.95		
			-	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1.300 Layanan	1.014 Layanan	78.00		
					Jumlah Dana	98,276,970	79,554,154	80.95		
			4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>		
					Jumlah Dana	98,579,850	73,371,766	74.43		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana		Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
							Fisik	%		
							Rp.			
1	2	3		4		6	7	8	9	10
			a.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	100.00		
					Jumlah Dana	98,579,850	73,371,766	74.43		
			-	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	100.00	Efisiensi anggaran	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan terukur
					Jumlah Dana	20,717,000	8,700,100	41.99		
			-	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	Efisiensi anggaran	Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dan terukur
					Jumlah Dana	9,336,000	3,536,000	37.87		
			-	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	100.00		
					Jumlah Dana	68,526,850	61,135,666	89.21		
			5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100.00		
					Jumlah Dana	9,981,000	7,665,000	76.80		
			a.	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	100		
					Jumlah Dana	9,981,000	7,665,000	76.80		
			-	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100		
					Jumlah Dana	9,981,000	7,665,000	76.80		

**BAB III**  
**PROGRAM UNGGULAN YANG DILAKSANAKAN**  
**OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025**

Program unggulan merupakan program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan Walikota Padang Panjang untuk periode 2025-2029 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Adapun program strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

No	OPD	Program Unggulan	Keterangan
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Tujuan :  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif  Sasaran : - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat - Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

## BAB IV

### TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang tahun 2024 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna. Kemudian DPRD juga telah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut. Dari rekomendasi yang disampaikan DPRD terhadap LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2024, tidak ada rekomendasi menyangkut urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Nihil	Nihil	Nihil

## **BAB V**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tidak ada melaksanakan program/kegiatan tugas pembantuan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 pada dasarnya merupakan evaluasi dan gambaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Melalui LKPJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2025. Untuk lebih mengoptimalkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang telah disusun, diharapkan dukungan dan komitmen serta konsistensi dari stakeholder sehingga tugas dan fungsi dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

**Padang Panjang, 15 Januari 2026**

**KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PADANG PANJANG**



**RUDY SUARMAN, AP  
Pembina Utama Muda, NIP. 19740918 199311 1 001**

Lampiran

Rekapan Prestasi yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

NO	OPD	TAHUN	PRESTASI	KETERANGAN
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Oktober 2025	OPD dengan Kategori A (Memuaskan) dalam Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	 <p>WALI KOTA PADANG PANJANG <i>Piagam Penghargaan</i> Nomor: 000.5.2.10/20/OPK/PP/10/2025 Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan ini Wali Kota Padang Panjang memberikan penghargaan kepada: <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan kategori: "A (Memuaskan)" Padang Panjang, 20 Oktober 2025 Wali Kota Padang Panjang, Hendri Amis</p>
2.		November 2025	OPD Terinovatif II dalam Lomba Peringkat Daerah Terinovatif di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	 <p><b>PIAGAM PENGHARGAAN</b> DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> Sebagai <b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF II</b> Lomba Peringkat Daerah Terinovatif di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Padang Panjang, 20 November 2025 Wali Kota Padang Panjang, Hendri Amis, B.SiA</p>
3.		Tahun 2025	OPD dengan Tingkat Akurasi dan Validasi Data Terbaik Berdasarkan Hasil Verifikasi Tahun 2025	 <p><b>PIAGAM PENGHARGAAN</b> BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PADANG PANJANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang</b> Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Dengan Tingkat Akurasi dan Validasi Data Terbaik Berdasarkan Hasil Verifikasi Tahun 2025 di Kota Padang Panjang Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Abdul Razi, S.Si</p>